



Industri Pertahanan Nasional dalam Strategi Penangkalan

Hardi Mahendi

Sekolah Staf Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal), Indonesia

E-mail: dy_mihen@yahoo.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-08-11 Revised: 2022-09-22 Published: 2022-11-01 Keywords: <i>National Defense Industry; Deterrence Strategy; Based Near Military.</i>	Deterrence strategy in the conventional perspective is basically based on a military approach. The simple thing is that if a country increases its military capacity, one of which is a sophisticated defense equipment in large numbers beyond the enemy's country, then the enemy country will immediately change its policies to avoid the risks they will bear. Therefore, it is necessary to optimize the use of the defense equipment owned to support the deterrence strategy, in the deterrence strategy it is necessary to have air power and maritime power that is flexible, fast & easy to move, wide area of observation and easy to project. The role of the National Defense Industry has a correlation with the Deterrence Strategy, the correlation is military strength (development of military infrastructure and defense equipment), as follows1. Development of Quality and Quantity of Warships of the Republic of Indonesia (KRI) in the context of Implementing Sea Combat Alert Operations, 2. Use of Maritime Patrol Aircraft to Improve Early Detection. 3. Development and Development of Coastal Defense (Coastal Defense). In this study, to use this type of qualitative descriptive research. The research method used is aimed at obtaining data on the relationship between the national defense industry in the Strategy of Deterrence. data sources come from online and offline library studies such as books, articles, scientific works and official government documents, the results of data processing are then analyzed by comparing with the theory of deterrence strategy.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-08-11 Direvisi: 2022-09-22 Dipublikasi: 2022-11-01 Kata kunci: <i>Industri Pertahanan Nasional; Strategi Penangkalan; Berbasis Pendekatan Militer.</i>	Strategi Penangkalan dalam perspektif konvensional pada dasarnya berbasis pendekatan militer. Sederhananya adalah jika sebuah negara meningkatkan kapasitas militernya yang salah satunya adalah alutsista yang canggih dalam jumlah besar melebihi negara seteru, maka negara seteru akan segera merubah kebijakannya untuk menghindari risiko yang akan mereka tanggung. Oleh karena itu perlu mengoptimalkan penggunaan alutsista yang dimiliki untuk mendukung strategi penangkalan, dalam strategi penangkalan dibutuhkan kekuatan udara (airpower) dan kekuatan maritim (maritime power) yang luwes, cepat & mudah digerakkan, luas area pengamatan dan mudah diproyeksikan. Peran Industri Pertahanan Nasional mempunyai korelasi hubungan dengan Strategi Penangkalan, korelasi tersebut adalah kekuatan militer (pembangunan sarana prasarana dan alutsista militer), sebagai berikut1. Pembangunan Kualitas Dan Kuantitas Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam rangka Pelaksanaan Operasi Siaga Tempur Laut, 2. Penggunaan Pesawat Patroli Maritim Guna Peningkatan Deteksi Dini. 3. Pembangunan dan Pengembangan Pertahanan Daerah Pesisir (Coastal Defence). Pada penelitian ini, untuk menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan tersebut bertujuan untuk mendapatkan data-data tentang hubungan industri pertahanan nasional dalam Strategi Penangkalan. sumber data berasal dari studi Pustaka yang bersifat online maupun offline seperti buku, artikel, karya ilmiah dan dokumen resmi pemerintah hasil pengolahan data selanjutnya di analisis dengan cara membandingkan dengan teori Strategi Penangkalan).

I. PENDAHULUAN

Industri pertahanan menjadi salah satu hal krusial dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara untuk menjamin kelangsungan hidup maupun eksistensi bangsa dan negara. Industri pertahanan yang kuat mempunyai dua efek utama, yakni efek langsung terhadap

pembangunan kemampuan pertahanan, dan efek terhadap pembangunan ekonomi dan teknologi nasional. Industri pertahanan merupakan bagian dari industri nasional yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi

kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bidang pembangunan kemampuan pertahanan, industri pertahanan yang kuat tercermin dari tersedianya jaminan pasokan kebutuhan alutsista serta sarana pertahanan secara berkelanjutan. Ketersediaan pasokan tersebut juga menjadi prasyarat mutlak bagi kepastian dan keleluasaan dalam menyusun rencana jangka panjang pembangunan ke-mampuan pertahanan, sehingga meminimalisir kekhawatiran akan faktor-faktor politik dan ekonomi, seperti embargo atau restriksi.

Cakupan Industri Pertahanan Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, bahwa Industri Pertahanan merupakan industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Industri Pertahanan sendiri dikelompokkan menjadi 4 sub industri meliputi:

1. Industri alat utama, merupakan badan usaha milik negara yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemadu utama (lead integrator) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama.

Tabel 1. Kemampuan Produksi industri Pertahanan (1)

NO	INDUSTRI PERTAHANAN	KEMAMPUAN PRODUKSI	KETERANGAN
1	PT. Dirgantara Indonesia	<i>Fixed Wing (Medium Heavy (CN295), Medium (CN235, N245), Light Heavy (NC212-200, NC212-400, NC212i), Far/Casr 23 Light(N219)); Rotary Wing (Heavy Heli (NAS332 Superpuma, H215, H225M), Medium Heli (Bell 412SP-HP, AS565 Panther, BEU 412 EP, AS365 Dauphin), Light Heli (BO 105 CB/CBS, AS350/ AS355NP Ecureuil, AS555/AS550 Fennec).</i>	<i>Lead integrator untuk pesawat tempur, pesawat terbang, atau helicopter</i>
2	PT. Pindad	Senjata (ringan, Genggam, dan berat), Munisi (Kaliber Besar, Kecil, Khusus), Bom, Panser (Anoa, Komodo, Harimau Medium Tank, Water Canon, Badak, Sanca)	<i>Lead integrator cluster industri pertahanan sub-cluster kendaraan tempur dan senjata</i>
3	PT. PAL	Kapal FPB-28, FPB-38, FPB-57, Kapal Cepat Rudal 60, Kapal Landing Platform Dock (LPD), Kapal Strategic Sealift Vessel 123 M, Kapal Bantu Rumah Sakit, Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 105 M, Kapal Selam Nagapasa Class 1500 Ton, Kapal Niagas.d	<i>Lead integrator untuk cluster industri pertahanan kapal kombatan, sub-cluster kapal perang atas air dan kapal selam</i>

2. Industri komponen utama dan/atau penunjang, merupakan badan usaha milik negara

dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi komponen utama dan/atau mengintegrasikan komponen atau suku cadang dengan bahan baku menjadi komponen utama Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dan/atau wahana (platform) sistem alat utama sistem senjata.

Tabel 2. Kemampuan Produksi industri Pertahanan (2)

NO	INDUSTRI PERTAHANAN	KEMAMPUAN PRODUKSI	KETERANGAN
1	PT. Dahana	Bahan Komersil Peledak (Militer & SIPIL)	Bergerak di bidang industri strategis dengan produk layanan bahan peledak terintegrasi untuk sektor minyak dan gas, pertambangan umum, quarry, konstruksi, dan pertahanan
2	PT. LEN	Alkom Ranpur, Surveillance, Combat Management System, Listrik Tenaga Surya	Salah satu anggota BUMN klaster NDHI (National Defence and Hightech Industri) dan fokus pada teknologi elektroteknika yang mengembangkan, memproduksi dan membangun sarana & prasarana berbasis teknologi elektroteknika untuk hankam, publik dan industri.
3	PT. INTI	Video Surveillance System, Next Generation Video Messaging System, Digital TV System	Badan usaha milik negara yang bergerak di bidang industri perangkat cerdas (smart devices), aplikasi cerdas (smart application), dan integrator cerdas (smart integrator)
4	PT. Krakatau	Baja KSW 500 (tahan peluru) Hot/Cold Rolled Coil, Wire Road	Bahan baku pembuatan peralatan militer
5	PT. INKA	Gerbong Penumpang & Barang	Industri penunjang
6	PT. Bharata Indonesia	Bomb Basket, Sharp Bomb F-16 dan alatalat berat	Industri penunjang
7	PT. DOK Perkapalan Kodja Bahari	Kapal LCT, LCU, Repowering KRI	Core business di bidang industri perkapalan, khususnya di bidang perencanaan, pembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapal, alat apung dan konstruksi bangunan lepas pantai, serta jasa-jasa penunjang lainnya
8	PT. DOK Perkapalan Surabaya	Kapal LCT, LCU, Repowering KRI	Industri penunjang
9	PT. Industri Kapal Indonesia	Kapal Patroli, Kapal Kargo, Kapal Ikan, Kapal Tunda	Industri penunjang
10	PTPT. Boma Bisma Indra	Peralatan pembangkit tenaga listrik (Paiton), Kondensor, Peralatan pabrik, dsb	Industri penunjang

3. Industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi suku cadang untuk alat utama sistem senjata, suku cadang untuk komponen utama, dan/atau yang menghasilkan produk perbekalan.
4. Industri bahan baku, merupakan badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta yang memproduksi bahan baku yang akan digunakan oleh industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, dan industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan).

Teori Penangkalan berkembang sejak perang dunia ke-2. Penangkalan dapat digambarkan sebagai tindakan pencegahan terhadap suatu aksi dengan menimbulkan rasa takut akan akibat yang akan ditimbulkannya sebagai konsekuensi bila aksi tersebut tetap dilakukan. Penangkalan

ditujukan untuk mencegah terjadinya perang. Teori tentang Penangkalan merupakan suatu teori tentang bagaimana mengintegrasikan usaha pertahanan yang didalamnya berisi seluruh instrumen negara untuk saling mendukung dan saling memperkuat. Instrumen yang paling dominan meliputi instrumen politik, ekonomi, psikologi, teknologi dan militer. Keberhasilan penangkalan dapat ditunjukkan apabila lawan mengurungkan niatnya. Strategi penangkalan dapat dilaksanakan melalui cara penolakan atau penangkalan dengan cara pembalasan. Pertahanan nir militer berbasis pada teori penangkalan walaupun metode yang digunakannya tidak selalu identik dengan penonjolan kekuatan. Instrumen strategi penangkalan salah satunya adalah instrumen kekuatan militer disamping instrumen-instrumen lainnya (politik/diplomatik, ekonomi, psikologi, teknologi dan militer). Peran Industri Pertahanan Nasional mempunyai korelasi hubungan dengan Strategi Penangkalan, korelasi tersebut adalah kekuatan militer (pembangunan sarana prasarana dan alutsista militer), dalam strategi penangkalan dibutuhkan kekuatan udara (airpower) dan kekuatan maritim (maritime power) yang luwes, cepat & mudah digerakkan, luas area pengamatan dan mudah diproyeksikan. Pembangunan kekuatan militer TNI di wujudkan dalam program MEF (Minimum essential force).

Kebijakan MEF seyogyanya dapat menjadi pendorong percepatan kemandirian industri pertahanan dengan cara *pertama*, pengadaan alutsista berbasis kapabilitas industri pertahanan dalam negeri. *Kedua*, jika industri pertahanan dalam negeri belum mampu memenuhi, maka pengadaan melalui produsen luar negeri, *transfer of technology* (ToT) kepada industri pertahanan dalam negeri menjadi prasyarat. ToT yang dilakukan akan menjadi dasar penguasaan teknologi alutsista di masa depan. dalam mencapai pemenuhan target Minimum Essential Force Kemandirian industri pertahanan atau kemampuan memproduksi peralatan militer sendiri tanpa bergantung pada negara lain Oleh karena itu, Industri pertahanan Nasional menjadi salah satu ujung tombak untuk mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri, untuk memenuhi kualitas dan kuantitas alutsista yang sesuai dengan karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi, juga untuk membangun deterrence effect terhadap negara lain.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan proses atau langkah-langkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis yang digunakan untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah dan jawaban atas pertanyaan. Pada penelitian ini, untuk menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (Afifudin, 2009:59). Metode penelitian yang digunakan tersebut bertujuan untuk mendapatkan data-data tentang hubungan industri pertahanan nasional dalam Strategi Penangkalan. sumber data dari studi Pustaka yang bersifat online maupun offline seperti buku, artikel, karya ilmiah dan dokumen resmi pemerintah hasil pengolahan data selanjutnya di analisis dengan cara membandingkan dengan teori strategi penangkalan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Michael A. Hitt & R. Duane Ireland & Robert E. Hoskisson (2011) bahwa "Strategi selalu menghasilkan keuntungan. Teori Penangkalan didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang melampaui penangkalan bersifat tetap yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran bidang keamanan tanpa menggunakan secara langsung kekuatan dalam jumlah besar, jika melampaui batas tertentu maka yang akan memicu perang Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, bahwa Industri Pertahanan merupakan industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategi penangkalan dalam perspektif konvensional pada dasarnya berbasis pendekatan militer. Sederhananya adalah jika sebuah negara meningkatkan kapasitas militernya yang salah satunya adalah alutsista yang canggih dalam jumlah besar melebihi negara seteru, maka negara seteru akan segera merubah kebijakannya untuk menghindari risiko yang akan mereka tanggung. Oleh karena itu perlu mengoptimalkan penggunaan alutsista yang dimiliki untuk mendukung strategi penangkalan.

1. Pembangunan Kualitas Dan Kuantitas Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam rangka Pelaksanaan Operasi Siaga Tempur Laut

Tugas TNI AL dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP) adalah penyelenggaraan operasi laut yaitu serangkaian kegiatan tempur laut (Sea Battle) yang dilaksanakan oleh satuan armada secara mandiri atau gabungan/kerja sama dengan angkatan lain di daerah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu serta terikat oleh satu tujuan dan satu rencana serta diarahkan untuk mencapai tujuan strategis, taktik, logistik dan latihan. Operasi laut diselenggarakan dengan mengarahkan seluruh kekuatan dan kemampuan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang dimiliki oleh TNI AL. Tujuan dari operasi laut yaitu untuk menegaskan kedaulatan negara di laut, mencegah/menangkal, dan menindak segala macam bentuk ancaman militer maupun non militer yang dilaksanakan di atau melewati laut, menjamin terlaksananya pengendalian laut untuk kepentingan sendiri (Sea Control), mencegah, dan menghalangi penggunaan laut oleh pihak lawan (Sea Denial), serta terciptanya penegakan hukum dan kedaulatan di laut sehingga aman dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas penggunaan atau pemanfaatan laut. Indonesia memiliki bentuk geografis yang sangat strategis dengan choke points dan jalur pelayaran sangat ramai dilalui oleh kapal-kapal yang melaksanakan pelayaran dan perlintasan dari berbagai macam arah. Kondisi geografis Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sangat besar menjadi sebuah keharusan untuk memiliki suatu bentuk karakter pertahanan negara dan bangsa. Karakter pertahanan tersebut adalah pertahanan maritim yang akan menjadi pola pandang bagi segenap rakyat Indonesia. Pertahanan maritim ini yang akan menjadi pedoman untuk menangkal segala bentuk ancaman yang akan datang dan masuk ke NKRI.

Saat ini permasalahan yang dihadapi TNI Angkatan Laut dalam penyelenggaraan Operasi Siaga Tempur Laut adalah kuantitas jumlah dan kualitas KRI yang melaksanakan operasi siaga tempur laut, KRI yang melaksanakan operasi siaga tempur laut seringkali terkendala dengan kesiapan platform, Sewaco, dan ketahanan (endurance) logistik dalam menghadapi luasnya daerah operasi di

wilayah laut NKRI. Pembangunan Kualitas Dan Kuantitas Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesiapan unsur KRI sehingga mampu melaksanakan tugas operasi. Dalam hal kuantitas jumlah dan kualitas (teknologi dan sistem senjata) maka kebutuhan alutsista matra laut secara ideal harus terpenuhi sesuai dengan program MEF sehingga mampu menghadapi segala kemungkinan ancaman kedaulatan di laut. Dalam UU No.16 Tahun 2012. diamanatkan kepada BUMN industri pertahanan menjadi *lead integrator* pembangunan alutsista. Lebih lanjut keputusan KKIP Kep/12/KKIP/XII/2013 menyebutkan PT PAL Indonesia (Persero) menjadi *lead integrator* pembangunan alutsista matra laut, PT PAL Indonesia (Persero) mampu merea-lisasikan kontrak pengadaan Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 meter, Kapal Landing Platform Dock (LPD) 125 meter, Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) 124 Meter, dan Kapal Selam Kelas Changbogo. Realisasi penyelesaian pembangunan dalam termin *on schedule* dan bahkan dalam kategori *ahead delivery*. Penguasaan teknologi kapal tersebut di atas dimiliki dengan skema ToT yang kemudian dikembangkan oleh sesuai dengan kebutuhan pengguna oleh PT PAL Indonesia (Persero).

Dalam rangka membangun kekuatan TNI Angkatan Laut Pemerintah melalui Kemhan berencana untuk mengakusisi dua unit kapal perang frigate kelas Iver Huitfeldt buatan Denmark. Spesifikasi Kemampuan jelajah samudera menjadi salah satu pertimbangan pengadaan frigate. Dilansir dari janes.com, Kapal tersebut memiliki spesifikasi panjang 138 meter, kecepatan maksimal 30 knot, dan awak kapal 165 personel. Kapal tersebut dapat dipersenjatai rudal jenis BGM-109 Tomahawk atau sejenisnya. Pembangunan dua unit frigate kelas Iver Huitfeldt direncanakan akan di bangun di PT. PAL Indonesia (Persero) dengan skema ToT. PT. PAL Indonesia (Persero) memiliki catatan keberhasilan dalam ToT sebelumnya seperti pada program Kapal Patroli Cepat (FPB), LPD, Patroli Kawal Rudal (PKR), dan Kapal Selam. PT. PAL Indonesia (Persero) memiliki kesiapan untuk menjalankan program ToT dan memastikan penguasaan teknologi serta keberlanjutan produksi frigate kelas Iver Huitfeldt. Pengadaan dua unit kapal perang frigate kelas Iver Huitfeldt buatan Denmark

akan semakin memperkuat TNI AL untuk melindungi wilayah NKRI dan menghadirkan efek gentar (*deterrence*) merupakan strategi penangkalan.

2. Penggunaan Pesawat Patroli Maritim Guna Peningkatan Deteksi Dini

Perkembangan lingkungan strategis secara global dan regional menimbulkan efek ancaman baik ancaman faktual maupun ancaman potensial terhadap keamanan laut. Negara Indonesia harus siap untuk menghadapi berbagai ancaman-ancaman tersebut. Kemampuan untuk melakukan deteksi dan cegah dini terhadap ancaman-ancaman tersebut mutlak harus dapat dikuasai oleh lembaga atau institusi keamanan maupun pertahanan di bidang kelautan dan ke-maritiman yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang. Salah satu upaya dalam pengumpulan data maritim adalah dengan memanfaatkan Pesawat Patroli Maritim, Pemanfaatan Pesawat Patroli Maritim telah berkembang dengan pesat dan banyak dimanfaatkan di kalangan sipil maupun militer, seperti: deteksi dini, intelligence surveillance and reconnaissance (ISR), pengambilan gambar dan video, Search and Rescue (SAR), survei wilayah, pemantauan wilayah dan pemetaan wilayah, pengamatan dan pengintaian daerah konflik dan berbahaya, patroli perbatasan hingga serangan bersenjata dari udara dan lain sebagainya. TNI AL sebagai alat negara mengemban tugas pertahanan negara di laut memiliki kemampuan Operasi maritim yang harus terus dikembangkan. Berkaitan dengan hal tersebut yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan operasi TNI AL dengan memanfaatkan Pesawat Patroli Maritim.

3. Pembangunan dan Pengembangan Pertahanan Pesisir (*coastal defence*)

Pertahanan pesisir dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan suatu negara untuk melindungi garis pantainya melalui serangkaian sistem pertahanan. Secara historis, pertahanan pesisir harus dipahami sebagai seperangkat tindakan atau kebijakan yang diambil suatu negara untuk mencegah (*deter*) masuknya musuh atau dalam skenario, menangkal serangan musuh di garis pesisirnya. Perkembangan teknologi sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua telah merubah secara total gagasan bagaimana cara mempertahankan dan mengamankan

wilayah maritim. Selain itu, perkembangan perkembangan teknologi juga membuat konsep pertahanan pesisir menjadi lebih baik dan komprehensif yang menekankan tiga hal: deteksi (*detection*), pelacakan (*tracking*) dan pencegahan (*deterrence*) terhadap ancaman ataupun musuh. Jika melihat peta kondisi geografis Indonesia, penerapan strategi pertahanan pesisir yang efektif jelas dapat mendukung tujuan untuk mengamankan dan mempertahankan wilayah maritim Indonesia dari pesisir pantai. Tidak hanya di sekitar chokepoints, pulau-pulau terdepan jalur pelayaran utama seperti Nunukan, Morotai, Nunukan, Biak dan Kupang juga menjadi lokasi terbaik untuk mengimplementasikan system dan strategi pertahanan pesisir yang efektif. Konsep pertahanan pesisir yang efektif juga harus terdiri dari system deteksi, pelacakan dan persenjataan yang terintegrasi dalam struktur komando gabungan.

Kementerian Pertahanan melalui Program Pembinaan Potensi Teknologi Industri Pertahanan (Binpottekindhan) menyelenggarakan Program *Reverse Engineering* Sistem Rudal, yang merupakan program konsorsium Industri Pertahanan yang diinisiasi oleh PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. Pindad (Persero), PT. Dahana (Persero), PT. Len Industri (Persero), dan PT. TRESS. PT. Dirgantara sebagai *Lead Integrator* konsorsium, diharapkan mampu menguasai teknologi rudal sehingga dapat mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan dalam memproduksi Rudal Nasional. Hal ini selaras dengan enam program nasional industri pertahanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun 2014 yaitu Pengembangan Jet Tempur KF-X/IF-X, Pembangunan Kapal Selam, Pembangunan Industri Propelan/Mesiu, Pengembangan Roket Nasional, Pengembangan Rudal Nasional dan Pengembangan Radar Nasional. Pengembangan sistem rudal nasional yang berbasis dari rudal C705, merupakan rudal anti kapal permukaan produksi perusahaan CVIC China, saat ini telah terpasang di beberapa KRI. Dimana seperti diketahui sesuai spesifikasi teknisnya, rudal C-705 dipersiapkan untuk mampu mengkandaskan kapal perang lawan yang berbobot hingga 1500 ton (kelas *light frigate*). Daya hancur yang dihasilkan bisa mencapai 95,7%, ideal untuk menenggelamkan kapal. Menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (2012)

“Peluru kendali ini kalau kita bisa produksi dalam negeri, kita akan pasang di daerah perbatasan untuk pengamanan”. Dan diharapkan dapat menjadi sistem pertahanan wilayah pesisir dan perbatasan modern serta menjadi efek gentar bagi negara di sekitar kawasan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Peran Industri Pertahanan Nasional mempunyai korelasi hubungan dengan Strategi Penangkalan, korelasi tersebut adalah kekuatan militer (pembangunan sarana prasarana dan alutsista militer). Strategi Penangkalan Laut/Maritim mempunyai peran yg lebih dominan sebagai berikut:

1. Pembangunan Kualitas Dan Kuantitas Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam rangka Pelaksanaan Operasi Siaga Tempur Laut.
2. Penggunaan Pesawat Patroli Maritim Guna Peningkatan Deteksi Dini.
3. Pembangunan dan Pengembangan Pertahanan Pesisir (*Coastial Deffence*).

B. Saran

Pembangunan kekuatan militer dalam rangka melaksanakan strategi penangkalan seharusnya sebagai pendorong percepatan kemandirian industri pertahanan dengan cara

1. Pengadaan alutsista berbasis kapabilitas industri pertahanan dalam negeri
2. Jika industri pertahanan dalam negeri belum mampu memenuhi, maka pengadaan melalui produsen luar negeri, transfer of technology (ToT) kepada industri pertahanan dalam negeri menjadi prasyarat.

DAFTAR RUJUKAN

Aida Ade Nurul 2019 “Potret Industri Pertahanan Indonesia” Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Jakarta

Alban Sciascia, Muhammad Fauzan Malufti, “Memikirkan kembali pertahanan pesisir Indonesia”, Jurnal Defendonesia, Volume 5 Nomor 1, April 2021, hal. 28.

Green, M. E. (2017). *Countering Coercion in Maritime Asia: The Theory and Practice of Grey Zone Deterrence*. Lanham: Rowman & Littlefield.

<https://lembaga.keris.net/rudal-c-705-produksi-dalam-negeri-untuk-pijakan-kemandirian-di-bidang-rudal/>, diakses tanggal 1 Februari 2022.

<https://lembaga.keris.net/rudal-c-705-produksi-dalam-negeri-untuk-pijakan-kemandirian-di-bidang-rudal/>, diakses tanggal 1 Februari 2022.

<https://www.idu.ac.id/berita/pusat-studi-teknologi-persenjataan-unhan-gelar-focus-group-discussion-bahas-program-rudal-nasional.html>, diakses pada 29 Januari 2022.

<https://www.idu.ac.id/berita/pusat-studi-teknologi-persenjataan-unhan-gelar-focus-group-discussion-bahas-program-rudal-nasional.html>, diakses pada 29 Januari 2022.

Keputusan Ketua Harian KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) Nomor : KEP/07/KKIP/IX/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Program Nasional Industri Pertahanan.

Keputusan Ketua Harian KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) Nomor : KEP/07/KKIP/IX/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Program Nasional Industri Pertahanan.

KKIP. 2020. 6 Strategi Membangun Daya Saing Industri Pertahanan Indonesia di Pasar Internasional, diakses dari <https://www.kkip.go.id/2020/05/11/6-strategi-membangundaya-saing-industri-pertahanan-indonesia-di-pasar-internasional-1/#>

Michael A. Hitt & R. Duane Ireland & Robert E. Hoskisson (2011)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan